

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Kualitatif, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), Halaman 122
- Burhan Asafa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Utara: Raja Grafindo.
- Bushong, Stewart C. *Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection*. 10th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby, 2013.
- Gatot Supramono. (2009). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Solo: Djambatan.
- Muh. Taufik Makarto. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Rakel Yunardhani. (2013). *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*.
- Rahmani, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 65.
- Sigit Nugroho dkk, *Metode Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), Hal 47
- Simon, R. A. (2012). *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*. Jakarta: Karya Putra Dawarti.
- Siswanto Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta Utara: Raja Grafindo.
- Suharjo Widiada. (1998). *Sejarah dan Konsepsi Perasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarso Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian*
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR*. Jakarta: UIR Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2)
Tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang
Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Peraturan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas.1-Pw.02.04-5
Tahun 2024 Tentang Penunjukan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Dan
Koordinator Ppr Alat X-Ray Tahun Anggaran 2024.

A. Jurnal

BNN. (2004). *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (1983). *Penjara ke Pemasarakatan*.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (1983). *Penjara ke Pemasarakatan*. 68.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2009). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH.OT.02.02 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Dirjen Pemasarakatan.

Monika Suhayati. (2015). *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015. 3

B. Website

<https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133313/permenkumham-no-33-tahun-2015>

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23273/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Wikipedia. (2017, November 28). *Wikipedia*. Retrieved Oktober 18, 2020, [http://id.Wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasarakatan](http://id.Wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan) (n.d.). retrieved from <http://www.news.detik.com> (n.d.). retrived from <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23273/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> di akses pada tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 11.00 WIB

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga Pemasarakatan KelasIIA Rantauprapat](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan_KelasIIA_Rantauprapat)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133313/permenkumham-no-33-tahun-2015> diakses pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 09.00 WIB.